



► PENATAAN MINIMARKET

## Pemkot Kaji Dampak Sosial Ekonomi

**JOGJA**—Pada bulan ini Pemkot akan mengkaji aspek sosial ekonomi terhadap keberadaan *minimarket* yang ada di wilayah Kota Jogja. Pengkajian itu rencananya melibatkan sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi.

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Sejak diberlakukannya Perwal No.56/2018 tentang Penataan Usaha Minimarket, Pemkot memang tak lagi membatasi kuota maksimal *minimarket*. Sebagai gantinya, syarat pendirian *minimarket* diganti pengkajian aspek sosial ekonomi serta penetapan batas jarak minimal sejauh 400 meter dari pasar tradisional.

Kabid Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Benedict Cahyo Santosa, menjelaskan kajian ini

► Kajian terhadap *minimarket* dilakukan dalam dua kategori, yakni pemetaan dan sosial ekonomi.

► Forpi sejauh ini belum menemukan produk UMKM lokal yang dipajang di *minimarket* berjejer.

bukan merupakan kajian untuk satu toko, melainkan secara umum. "Kajian itu bersifat pemetaan, melihat berapa jumlah toko swalayan, dan juga aspek sosial ekonominya," ujarnya, Senin (7/10).

Kajian tersebut, kata dia, nantinya dibagi dalam dua kategori, yakni pemetaan dan kajian sosial ekonomi. Untuk kajian pemetaan diberlakukan kepada semua toko swalayan, mulai dari *minimarket*, *supermarket*, *departemen store* dan *hypermarket*. Sedangkan untuk analisa sosial ekonomi, kata dia, hanya diberlakukan khusus untuk *minimarket*.

Analisa sosial ekonomi, kata dia, dilakukan untuk mencari tahu seperti apa dampak ekonomi dan sosial sebuah toko swalayan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama bagi pasar tradisional dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM). "Dalam perwal itu disebutkan jika toko swalayan harus bisa bersinergi dengan pertumbuhan pasar rakyat dan UMKM sekitar," katanya.

Saat ini dinas ini memang tidak memiliki data berapa jumlah toko swalayan yang ada di Jogja. Pasalnya, pendataan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja sebagai instansi pengampu berkas perizinan. "Kami tidak menerima tembusan, makanya dengan kajian ini kami mau membuat *database*, berapa toko swalayan beserta kategorinya," kata dia.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengungkapkan berdasarkan pemantauannya sejauh ini belum menemukan produk



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005